

Kemenag Matangkan Peta Jalan Kemandirian Pesantren

Ditulis oleh Redaksi pada Jumat, 12 Maret 2021



Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendis Kemenag menggelar finalisasi kerangka rencana tindak lanjut Peta Jalan Kemandirian pesantren (PJKP). Kegiatan yang digelar di hotel Swis Bell Bogor, 10-12 Maret 2021 ini merupakan lanjutan dari serial grup diskusi terpumpun (FGD) Kelompok Kerja Kemandirian Pesantren.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono mengatakan, PJKP disusun sebagai implementasi dari amanat UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Dalam UU disebutkan, satu di antara banyak fungsi pesantren adalah memberdayakan masyarakat.

Menurut rencana, PJKP bisa selesai akhir Maret 2021, karena Menteri Agama Yaquut Cholil Choumas akan menyampaikan hasilnya kepada Presiden RI Joko Widodo pada awal April 2021.

“PJKP ini digelar sebagai implementasi fungsi pesantren sebagai pemberdayaan masyarakat. Awal April sudah harus disampaikan ke presiden melalui Pak Menteri,” kata Waryono.

Pada kesempatan yang sama, melalui koneksi daring dengan aplikasi Zoom, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan bahwa pesantren harus terlibat dan berperan aktif dalam penguatan ekonominya.

Banyak bisnis yang bisa digeluti pesantren antara lain *halal food*, *halal style*. Pada sektor seni, misalnya ada gambus, kaligrafi, dan seni-seni lain yang juga memiliki nilai jual yang perlu dikembangkan oleh pesantren.

Baca juga: [Diplomasi Santri, NU Tiongkok Kuatkan Relasi Indonesia-Tiongkok](#)

“Pesantren harus terlibat aktif menguatkan potensi ekonominya. Banyak varian bisnis yang bisa dikembangkan santri, halal food, halal style, kemudian pada sektor seni misalnya, seni kaligrafi, seni musik islami dll,” tutur Ramdhani.

FGD PJKP yang difasilitasi oleh Alissa Wahid ini, diawali dengan mengulas bahan PJKP, kompilasi bahan, diskusi pendalaman, evaluasi pendalaman, dan diakhiri dengan penyusunan rencana tindak lanjut.

Hadir dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Pendis Muhammad Ali Ramdhani, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghafur, Asdep Ekonomi Syariah dan Keuangan Inklusi Kemenko Perekonomian, Erdiriyo, Kasubdit Pendidikan Pesantren Basnang Said, Staf Khusus Menteri Nuruzzaman dan Wibowo Prasetyo, Ketua Pokja PJKP Hasanudin Ali, Ketua RMI PBNU Abdul Ghaffarrozin, Perwakilan Bank Indonesia Haryono dan Yunita, serta enterpreuner dan akademisi.